



## **PENGELOLAAN ADMINISTRASI DI KAMPUNG ISAWA HIMAN DISTRIK SIEPKOSI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Irmayani Misrah<sup>1</sup>, Telly Nancy Silooy<sup>2</sup>, Enias Isaba<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Papua,  
Indonesia

Email: Irmayani.unaim@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/lapago.vol3.no1.art3>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Administrasi di Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya dengan 5 (lima) Indikator yaitu (1) Administrasi Umum, (2) Administrasi Penduduk, (3) Administrasi Pembangunan, (4) Administrasi Keuangan, dan (5) Administrasi Lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase variabel pengelolaan administrasi kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya sebesar 13,32 %. Dengan demikian menunjukkan bahwa Pengelolaan Administrasi yang ada Kantor Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi masih belum maksimal, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan buku administrasi kampung yang tidak lengkap dan masih sangat kurang, karena persentase yang diperoleh sangat rendah. Hasil tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan dari 5 (indikator) pengelolaan administrasi diantara yaitu : (1) Indikator administrasi umum sebesar 16,67 %, (2) Indikator administrasi penduduk sebesar 16,67 %, (3) Indikator Administrasi penduduk sebesar 8,33 %, (4) Administrasi keuangan sebesar 13,86 %, dan (5) Administrasi lainnya sebesar 11,11 %.

**Kata Kunci:** Pengelolaan; Administrasi; Kampung



### **Abstract**

*This research aims to determine administrative management in Isawa Himan Village, Siepkosi District, Jayawijaya Regency with 5 (five) indicators, namely (1) General Administration, (2) Population Administration, (3) Development Administration, (4) Financial Administration, and (5) Other Administration. This type of research uses descriptive with a quantitative approach. The data analysis technique used is descriptive data analysis technique using the frequency distribution formula. The results of the research show that the percentage of administrative management variables in Isawa Himan village, Siepkosi District, Jayawijaya Regency is 13.32%. Thus, it shows that the existing Administrative Management of the Isawa Himan Village Office, Siepkosi District*



*is still not optimal, in this case it is related to the availability of village administration books which are incomplete and still very lacking, because the percentage obtained is very low. These results are based on analysis carried out from 5 (indicators) of administrative management including: (1) General administration indicator of 16.67%, (2) Population administration indicator of 16.67%, (3) Population administration indicator of 8.33 %, (4) Financial administration of 13.86%, and (5) Other administration of 11.11%..*

**Keywords:** Management; Administration; Village

## **Pendahuluan**

Pada awal perumusan secara formal kampung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, dikatakan bahwa kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung menjelaskan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kampung dan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan kampung yang sangat dibutuhkan kualitas aparat pemerintah yang memadai agar proses penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan begitu baik, terlebih dalam pengelolaan administrasi kampung.

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan Kampung adalah Kampung atau Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hak asal-usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi, kampung dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Bahkan lebih dari itu, sangat dimungkinkan untuk tumbuhnya kampung adat di luar kampung administratif. Kampung tidak berkedudukan sebagai pemerintah yang berbeda dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana di tegaskan dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kampung dan Kampung Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial kampung adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Adapun substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memuat peraturan kampung yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak asal-usul juga dengan asas subsidiaritas diantaranya yaitu : urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh kampung yang paling dekat dengan masyarakat, negara bukan menyerahkan kewenangan kampung secara langsung melalui undang-undang tanpa melalui mekanisme penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota, pemerintah tidak campur tangan dari atas terhadap kewenangan lokal skala kampung, melainkan memberikan dukungan dan fasilitas terhadap kampung.



Kesuksesan pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dan juga pemerintah kampung, karena kampung merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan kampung perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung, yang bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah kampung dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan kampung (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Jilid II: 2014:3).

Tata kelola pemerintahan kampung yang baik adalah pengelolaan pemerintahan kampung yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan kampung demi mencapai tertib administrasi kampung harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah kampung. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan kampung, penyelenggara pemerintah kampung, akan membantu meringankan tugas kepala kampung dan perangkat kampung dibidang administrasi kampung, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan kampung yang terdiri dari kepala kampung, perangkat kampung, dan BPD (Badan Permusyawaratan Kampung) dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggung-jawabannya. Namun, fenomena yang terjadi selama ini dalam bidang pengelolaan administrasi kampung masih banyak yang belum tertib serta kurang memadai.

Dalam hal pengelolaan administrasi, data penduduk ataupun laporan tahunan, semua buku register masih sering terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan tata cara pengisiannya pun belum sempurna. Padahal, jumlah penduduk dapat berubah sewaktu-waktu mengingat banyak penduduk yang tinggal sementara, dan administrasi pemerintahan kampung merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi kegiatan pemerintah kampung yang penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kampung. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan kampung, perangkat kampung berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register kampung. Sesungguhnya proses pencatatan data dan informasi tidak terlalu rumit untuk dilakukan, asal semua perangkat kampung, mulai dari tingkat Dusun sampai Sekretaris Kampung, memiliki komitmen dan tekun di dalam melakukan pengisian. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Kampung perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, dimana penataan Administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi.

Pelaksanaan administrasi berkaitan dengan kegiatan kearsipan yang cakupannya sangat luas, sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, yang menyebutkan kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimana, setiap kampung harus memiliki buku register kampung, berdasarkan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Kampung, yang



pada tahun 2016 sudah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Kampung, yang di dalamnya memuat tentang (1) Administrasi Umum; (2) Administrasi Penduduk; (3) Administrasi Keuangan; (4) Administrasi Pembangunan; dan (5) Administrasi Lainnya.

Melihat situasi permasalahan tersebut masalah utama yang dihadapi perangkat kampung sekarang ini adalah Relative terbatasnya sumber daya perangkat kampung. Di samping itu, kurangnya sumber daya pendukung diantaranya lemari arsip yang masih kurang ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat menyimpan arsip walaupun arsip bisa di simpan difolder atau drive tersendiri itupun tidak menutup kemungkinan akan susah untuk di cari arsip yang dibutuhkan sehingga menyebabkan tidak tertibnya administrasi (kearsipan) yang ada di kampung. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kampung merupakan ujung tombak dalam kehidupan bernegara. Dikatakan demikian karena kampung merupakan pemerintah yang langsung berhadapan dengan rakyat. Dalam kaitannya dengan layanan masyarakat, dituntut kehati-hatian. Saat ini dalam setiap transaksi yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat harus disertai bukti secara transparan. Kehidupan modern menuntut alat-alat bukti intelektual yang dapat memahami lingkungan secara mendalam dan penuh arti sehingga tidak terikat dan terpaku pada rasa kekinian (Soedjatmoko, 1980: 28).

Terselenggaranya pemerintahan kampung yang baik, harus didukung dengan pengelolaan administrasi kampung yang benar. seperti yang di katakan oleh (Nurcholis 2011:135), bahwa administrasi kampung adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kampung pada buku administrasi kampung. Pengelolaan administrasi kampung yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah kampung dalam pengelolaan administrasi yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan di Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya, masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis menemukan bahwa kegiatan pencatatan tidak dilakukan dengan baik. Terdapat beberapa buku administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, namun belum lengkap dan beberapa kegiatan yang telah lakukan tidak di masukkan atau dicatat kedalam buku administrasi tersebut. Selain itu juga proses pelayanan administrasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah kampung sangat lambat dan juga kurang disiplin dalam hal waktu pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Administrasi di Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya."

## **Metode**

Lokasi penelitian yakni di Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya. Adapun waktu penelitian yang di lakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan



dengan variabel lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 12 Orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Kampung Iswa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 12 orang.

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini akan mengacu pada skala *Guttman*. Skala *Guttman* merupakan skala pengukuran untuk mendapat jawaban yang tegas, data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif) (Sugiyono, 2010 : 137). Peneliti menggunakan skala *Guttman* bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan dan terdiri dari 2 tingkatan yaitu :

1. Untuk jawaban Ya diberi nilai = 1
2. Untuk jawaban Tidak diberi nilai = 0

Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dengan demikian dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: Kuisisioner, Wawancara Awal, Pengamatan Observasi, dan Studi Literatur. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P = Nilai Persentase  
F = Frekuensi (Banyaknya Jawaban)  
n = Jumlah Sampel  
100 % = Nilai Konstanta

## Hasil dan Pembahasan

### Keadaan Lokasi Penelitian

Kampung Isawa Himan merupakan salah satu dari 9 kampung di Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya. Adapun 9 kampung tersebut adalah Kampung Iswa Himan, Lunaima, Manika, Noagalo, Sekan, Sekan Dalam, Siepkosi, Wekia, dan Kampung Yumogima. Distrik Siepkosi terletak pada ketinggian 1.741 meter di atas dari permukaan laut. Distrik ini mencakup wilayah seluas 354,72 km<sup>2</sup>. Sebanyak 3.742 jiwa yang menempati distrik ini Kantor kampung Isawa Himan terletak di Jalan Siepkosi Puawaga. Kampung Isawa himan dipimpin oleh seorang kepala kampung yaitu Bapak Sege Himan . Kampung Isawa Himan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Bagian utara berbatasan dengan Kampung Yumugima
- b. Bagian selatan berbatasan dengan Kampung Pisugi
- c. Bagian barat berbatasan dengan Kampung Pabuma
- d. Bagian timur berbatasan dengan Kampung Siepkosi

### Keadaan Responden

Jumlah responden pada Kantor Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya sebanyak 12 orang. Keadaan responden dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, agama dan umur.

**a. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

N o.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	11	91,67
2.	Perempuan	1	8,33
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>100</b>

*Sumber data: Olahan Data Primer, 2023*

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa keadaan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang atau (91,67%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang atau (8,33 %).

**b. Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Keadaan Responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat Pada Tabel 4.2 Berikut :

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

N o	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sarjana (S1)	0	0
2	SMA/SMK	5	41,67
3	SMP	3	25
4	SD	4	33,33
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>100</b>

*Sumber data: Olahan Data Primer, 2023*

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan S1 tidak ada, yang berpendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 41,67%, responden yang berpendidikan SMP sebanyak 2 orang atau 25%, dan responden yang berpendidikan SD sebanyak 4 orang atau 33,33 %.



**c. Keadaan Responden Berdasarkan Agama**

Keadaan Responden berdasarkan agama dapat dilihat Pada Tabel 4.3

Berikut :

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Peresentase (%)
1.	Kristen katolik	12	100
2.	Kristen Protestan	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Olahan Data Primer, 2023*

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa responden yang beragama Kristen Katolik sebanyak 12 orang atau 100 %, dan tidak ada responden yang beragama Kristen Protestan.

**d. Keadaan Responden Berdasarkan Umur**

Keadaan Responden berdasarkan umur, dapat dilihat Pada Tabel 4.4

Berikut :

**Tabel 4.4**  
**Keadaan Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	23-25	8	66,67
2.	26-30	1	8,33
3.	31-35	3	25
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Olahan Data Primer, 2023*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dari 12 responden yang ada, responden yang berumur 23 sampai 25 tahun sebanyak 8 orang atau 66,67 %, responden dengan tingkat umur 26 sampai 30 tahun sebanyak 1 orang atau 8,33% dan responden dengan tingkat umur 31 sampai 35 tahun sebanyak 3 orang 25%.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisa data di atas, maka selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai pengelolaan administrasi desa di Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan 5 (lima) indikator penilaian yang terdiri dari Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Pembangunan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Lainnya.

### **1. Administrasi Umum**

Dalam menganalisa indikator administrasi umum didasarkan pada 9 sub indikator yang disajikan pada tabel 4.30 berikut :

**Tabel 4. 30**  
**Rata-rata Persentase Indikator Administrasi Umum**

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Ketersediaan buku peraturan di Desa	16,67	83,33
2.	Ketersediaan buku keputusan Kepada Desa	16,67	83,33
3.	Ketersediaan buku inventaris dan kekayaan desa	25	75
4.	Ketersediaan buku aparat pemerintah desa	41,67	58,33
5.	Ketersediaan buku tanah kas desa	00,00	100
6.	Ketersediaan buku tanah di desa	00,00	100
7.	Ketersediaan buku agenda	8,33	91,67
8.	Ketersediaan buku ekspedisi	25	75
9.	Ketersediaan buku lembaran desa dan buku berita desa	00,00	100
<b>Jumlah Rata-rata (%)</b>		<b>14,81</b>	<b>74,18</b>

*Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2023*

## 2. Administrasi Penduduk

Dalam menganalisa indikator administrasi penduduk didasarkan pada 5 sub indikator yang disajikan pada tabel 4.31 berikut :

**Tabel 4. 31**  
**Rata-rata Persentase Indikator Administrasi Penduduk**

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Ketersediaan buku induk penduduk	16,67	83,33
2.	Ketersediaan buku mutasi penduduk desa	16,67	83,33
3.	Ketersediaan buku rekapitulasi jumlah penduduk	25	75





4.	Ketersediaan buku penduduk sementara	0,00	100
5.	Ketersediaan buku Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	00,00	100
<b>Jumlah Rata-rata (%)</b>		<b>11,66</b>	<b>88,33</b>

Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2023

### 3. Administrasi Pembangunan

Dalam menganalisa indikator administrasi pembangunan didasarkan pada 4 sub indikator yang disajikan pada tabel 4.32 berikut :

**Tabel 4. 32**  
**Rata-rata Persentase Indikator Administrasi Pembangunan**

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Ketersediaan buku rencana kerja pembangunan Desa	16,67	83,33
2.	Ketersediaan buku kegiatan pembangunan	8,33	91,67
3.	Ketersediaan buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan	8,33	91,67
4.	Ketersediaan buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	00,00	100
<b>Jumlah Rata-rata (%)</b>		<b>8,33 %</b>	<b>91,66%</b>

Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2023

### 4. Administrasi Keuangan

Dalam menganalisa indikator administrasi keuangan didasarkan pada 6 sub indikator yang disajikan pada tabel 4.33 berikut :

**Tabel 4. 33**  
**Rata-rata Persentase Indikator Administrasi Keuangan**

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Ketersediaan buku APB Desa	25	75
2.	Ketersediaan buku rencana anggaran biaya	41,67	58,33
3.	Ketersediaan buku kas pembantu kegiatan	00,00	100
4.	Ketersediaan buku kas umum	16,67	83,33

5.	Ketersediaan buku kas pembantu	00,00	100
6.	Ketersediaan buku bank desa	00,00	100
<b>Jumlah Rata-rata (%)</b>		<b>13,86</b>	<b>86,11</b>

*Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2023*

### 5. Administrasi Lainnya

Dalam menganalisa indikator administrasi lainnya didasarkan pada 6 sub indikator yang disajikan pada tabel 4.34 berikut :

**Tabel 4. 34**

#### **Rata-rata Persentase Indikator Administrasi Lainnya**

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Ketersediaan buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa	16,67	83,33
2.	Ketersediaan buku musyawarah desa	16,67	83,33
4.	Ketersediaan buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat	00,00	100
<b>Jumlah Rata-rata (%)</b>		<b>11,11</b>	<b>88,88</b>

*Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2023*

### Rekapitulasi Data

Berdasarkan hasil analisa data diatas, maka dapat dilihat hasil rekapitulasi variabel dengan 5 (lima) indikator, yaitu : Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Pembangunan, Administrasi Keuangan dan Administrasi Lainnya. Semuanya disajikan pada tabel 4.35 berikut :

**Tabel 4. 35**

#### **Rata-rata Rakapitulasi Variabel**

No	Pernyataan	Kategori Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Administrasi Umum	16,67	83,33
2.	Administrasi Penduduk	16,67	83,33
3.	Administrasi Pembangunan	8,33	91,66
4.	Administrasi Keuangan	13,86	86,11
5.	Administrasi Lainnya	11,11	88,88
<b>Jumlah Rata-rata (%)</b>		<b>13,32</b>	<b>86,66</b>

*Sumber : Olahan Data Primer Tahun 2023*

Hasil analisis data menunjukkan bahwa persentase variabel pengelolaan administrasi kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya sebesar 13,32 % untuk Jawaban Ya dan Sebesar 86,66 % menjawab tidak. Dengan demikian menunjukkan bahwa Pengelolaan Administrasi yang ada Kantor Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi masih belum maksimal, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan buku administrasi kampung yang tidak lengkap dan masih sangat kurang, karena persentase yang diperoleh sangat rendah yaitu hanya 13,32 %.



Hasil tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan dari 5 (indikator) pengelolaan administrasi diantara yaitu : (1) Indikator administrasi umum sebesar 16,67 %, (2) Indikator administrasi penduduk sebesar 16,67 %, (3) Indikator Administrasi penduduk sebesar 8,33 %, (4) Administrasi keuangan sebesar 13,86 %, dan (5) Administrasi lainnya sebesar 11,11 %.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pangkey dan Tampongany : 2018) tentang “Tata Kelola Administrasi Kampung dalam pengelenggaraan Pemerintahan Kampung Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kampung belum bekerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan administrasi kampung, dikarenakan kepala kampung dalam merekrut aparat kampung tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki aparat kampung, kemudian dalam pengurusan surat menyurat dilimpahkan kepada bendahara. Jadi dalam mengelola administrasi aparat kampung belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Posumah dan Tulusan (2022) tentang “Tata Kelola Administrasi Kampung Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara “ menunjukkan hasil yang hampir sama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Tata Kelola Administrasi Kampung Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara kurang maksimal dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah kampung terhadap masyarakat kampung, serta lemahnya peran ketua ketua Rukun Tetangga (RT) dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan - kebijakan yang diterapkan di kampung, serta kurangnya sarana informasi seperti : papan informasi dan sarana sarana informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh persentase variabel pengelolaan administrasi kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya sebesar 13,32 %. Dengan demikian menunjukkan bahwa Pengelolaan Administrasi yang ada Kantor Kampung Isawa Himan Distrik Siepkosi masih belum maksimal, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan buku administrasi kampung yang tidak lengkap dan masih sangat kurang, karena persentase yang diperoleh sangat rendah. Hasil tersebut berdasarkan analisis yang dilakukan dari 5 (indikator) pengelolaan administrasi diantara yaitu : (1) Indikator administrasi umum sebesar 16,67 %, (2) Indikator administrasi penduduk sebesar 16,67 %, (3) Indikator Administrasi penduduk sebesar 8,33 %, (4) Administrasi keuangan sebesar 13,86 %, dan (5) Administrasi lainnya sebesar 11,11 %.

### **Daftar Pustaka**

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV. Pustaka
- Anggara Sahya, 2016. *Administrasi Pembangunan*, Bandung. CV Pustaka Setia
- Ayu puspita puspita. 2022. Pengelolaan Sistem Pelayanan Administrasi Kampung *Journal of Public Administration* Vol. 5 No.1, 28.



- Intan, Levina *et all.* 2018. Tata Kelola Administrasi Kampung. *Jurnal Administrasi Vol.4 No.51.*
- Keradjaan Herson & Mouw Erland. 2016. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kampung Uniera Volume 5, Nomor 2,
- Liang Gie, The. 1997. Kamus Administrasi. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Jakarta: Erlangga.
- Setia. Ali, Faried. 2011. Teori dan Konsep Anggara Sahya, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi*, Bandung. CV Pustaka Setia
- Syafie, Inu Kencana. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Tulusan Femimy dan Posuma,H.J. Pilo,Rafli. 2022 .Tata Kelola Administrasi Kampung. *Jurnal Administrasi Publik*, No.121 Vol. VIII
- Widjaja, AW. 2002. Pemerintahan Kampung dan Administrasi Kampung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kampung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Kampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Kampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kampung dan Kampung Adat
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang menyebutkan tentang kearsipan
- Permendagri No.47 Tahun 2016 Tentang administrasi Pemerintahan Kampung Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Jilid II: 2014:3).